

**Volume 4 No. 1 Mei 2021**

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: URGENSI PEMILU DAN PARTAI POLITIK BAGI  
MASYARAKAT DESA PANTAI RAJA KABUPATEN KAMPAR**

**Auradian Marta<sup>a</sup>, Raja Muhammad Amin<sup>b</sup>, Wan Asrida<sup>c</sup>, Baskoro Wicaksono<sup>d</sup>**

a), b), c), d) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau

email:<sup>a</sup>[auradian\\_unri@yahoo.com](mailto:auradian_unri@yahoo.com)

| Info Artikel                                                                                                                                                                     | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diterima:</b> Juni 2021<br><b>Disetujui:</b> Juni 2021<br><b>Dipublikasikan:</b> Juni 2021<br><br><b>Kata Kunci:</b><br>Pendidikan kewarganegaraan,<br>Pemilu, partai politik | Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun dan membentuk karakter warga negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu aspek pendidikan kewarganegaraan yang perlu dikembangkan adalah mengenai Pemilu dan partai politik yang merupakan elemen mendasar dari demokratisasi. Sasaran kegiatan ini adalah aparatur pemerintahan desa, masyarakat desa, dan tokoh masyarakat di Desa Pantai Raja. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan bentuk sosialisasi politik dengan tahapan kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta rekomendasi. Hasil kegiatan pendidikan kewarganegaraan di Desa Pantai Raja diperoleh hasil peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dalam Pemilu dan partai politik yang terfokus pada politik identitas, politik uang, data pemilih, dan kampanye hitam. |

© 2021 LPPM Unira Malang

Alamat korespondensi:  
Jurusan Ilmu Pemerintahan,  
Universitas Riau  
[auradian\\_unri@yahoo.com](mailto:auradian_unri@yahoo.com)

p-ISSN: 2621-2765  
e-ISSN: 2621-3532

## PENDAHULUAN

Permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) baik pemilihan anggota legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung merupakan hal yang menarik untuk didiskusikan. Pemilu merupakan sarana dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi (Bishop & Hoeffler, 2016). Selanjutnya, dalam Pemilu yang demokratis sangat dibutuhkan partisipasi dari warga negara (Nabatchi & Amsler, 2014). Pemilu dan demokrasi membutuhkan kehadiran dari partai politik. Partai politik berfungsi sebagai rekrutmen pejabat politik dan menyalurkan aspirasi dari warga negaranya. Begitu urgennya Pemilu dan partai politik sehingga masyarakat wajib memahaminya secara mendalam.

Namun, keterbatasan informasi yang diperoleh masyarakat desa berkaitan dengan Pemilu dan partai politik menyebabkan masyarakat menjadi kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kondisi serupa juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Desa Pantai Raja Kabupaten Kampar merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya yang cukup memadai seperti perkebunan dengan sektor unggulan kebun karet dan sawit.

Secara geografis Desa Pantai Raja terletak diantara daerah-daerah sebagai berikut:

Tabel 1

Batas Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

| Batas           | Desa/ Kelurahan | Kecamatan         |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| Sebelah Utara   | Lubuk Sakat     | Perhentian Raja   |
| Sebelah Selatan | Sei Pagar       | Kampar Kiri Hilir |
| Sebelah Timur   | Kepau Jaya      | Siak Hulu         |
| Sebelah Barat   | Hangtuah        | Perhentian Raja   |
| Luas Desa       | Pantai Raja     | 130.900 Ha        |

Sumber: Pemerintah Desa Pantai Raja (2015)

Penduduk di desa Pantai Raja mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah Penduduk Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Jumlah Laki-laki       | 1.510 Orang |
| Jumlah Perempuan       | 1.373 Orang |
| Jumlah Total           | 2.883 Orang |
| Jumlah Kepala Keluarga | 1.087 KK    |
| Kepadatan Penduduk     | 276 per km  |

Sumber: Pemerintah Desa Pantai Raja (2015)

Perkembangan masyarakat dalam aspek ekonomi di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar belum diiringi dengan perkembangan dalam kehidupan perpolitikan. Indikatornya adalah masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum. Tidak hanya dalam pesta demokrasi saja bahkan masyarakat belum

mengoptimalkan fungsi dari partai politik untuk mewujudkan harapannya.

## **PENDEKATAN DAN METODOLOGI**

Masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa karena minimnya edukasi tentang Pemilu dan partai politik, maka tim pengabdian kepada masyarakat menyusun langkah-langkah dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat desa Pantai Raja. Pendidikan kewarganegaraan dapat dipahami dengan berbagai cara. Pendidikan kewarganegaraan dalam yang lebih sempit bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang konstitusi dan dasar lembaga demokrasi dan peraturan. Selanjutnya, dalam pengertian yang lebih luas fokusnya pada perolehan kompetensi yang memungkinkan berkaitan dengan partisipasi dan tindakan demokratis. Artinya, pendidikan kewarganegaraan mencakup pembelajaran sosial dan sosialisasi politik (Oesterreich, 2003). Selanjutnya, menurut Filzmaier dalam Yoldaş (2015) membedakan tiga dimensi pendidikan kewarganegaraan yakni (1) pendidikan kewarganegaraan sebagai penyampaian pengetahuan; (2) pendidikan kewarganegaraan sebagai kebebasan berekspresi dan promosi partisipasi; dan (3) pendidikan kewarganegaraan sebagai kompetensi sosial. Sementara itu, dalam konteks Indonesia pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk

membangun karakter anak bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan diarahkan pada mencerdaskan warga negara dalam memahami dan sadar akan hak dan kewajibannya (Rahayu, 2007).

Tahapan dalam kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat desa Pantai Raja adalah sebagai berikut:

### **a. Tahapan persiapan**

Tahapan persiapan ini berisikan kegiatan penjajakan dengan Pemerintah Desa mengenai bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pendidikan kewarganegaraan dengan masyarakat desa. Bentuk kegiatan yang disepakati dalam pendidikan kewarganegaraan ini adalah dengan melakukan sosialisasi politik dengan tema Pemilu dan Partai Politik. Langkah selanjutnya adalah tim pengabdian pada masyarakat menyusun tema-tema yang menjadi bahan untuk diskusi politik. Tema dalam pendidikan kewarganegaraan dengan bentuk sosialisasi politik ini adalah tentang “Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas” serta “Peran Partai Politik dalam Kehidupan Demokrasi”.

### **b. Tahapan Pelaksanaan dan Evaluasi**

Tahapan pelaksanaan dan evaluasi merupakan rangkaian kegiatan selanjutnya yang dilakukan pada sosialisasi politik dilakukan. Kegiatan pelaksanaan diisi dengan penyampaian materi dan diskusi dengan peserta yang telah dipilih oleh

Pemerintah Desa untuk mengikuti kegiatan pengabdian ini. Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang ada di Desa Pantai Raja.

#### c. Rekomendasi

Pemberian rekomendasi merupakan tahapan akhir dalam kegiatan ini. Rekomendasi ini merupakan hasil dari diskusi dan analisis terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa Pantai Raja mengenai pelaksanaan Pemilu dan peran dari partai politik di daerah tersebut.

### **PELAKSANAAN/IMPLEMENTASI KEGIATAN**

Kegiatan pendidikan kewarganegaraan dengan bentuk sosialisasi politik ini dilaksanakan pada 17 April 2015 pukul 09.00 WIB-12.00 WIB. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah dari unsur Pemerintahan Desa, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan lembaga kemasyarakatan yang berjumlah 20 orang. Pelaksanaan sosialisasi ini diawali dengan penyampaian materi oleh tim mengenai “Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas” serta “Peran Partai Politik dalam Kehidupan Demokrasi”. Membahas Pemilu berkualitas dan berintegritas juga mendiskusikan tentang sejarah Pemilu di Indonesia. Pemilu yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Legislatif (DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota).

Selanjutnya juga ikut dibahas dalam kegiatan pendidikan kewarganegaraan ini adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (baca: Pilkada). Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia telah dilaksanakan secara langsung sejak tahun 2005. Sementara itu, dalam perkembangannya Pilkada saat ini dilakukan secara serentak dimulai pada tahun 2015. Diskusi mengenai Pemilu dan partai politiknya berlangsung dengan menarik dengan berbagai fokus masalah yang dibahas dengan eksplorasi studi kasus yang terjadi di Desa Pantai Raja maupun di Indonesia secara keseluruhan. Berikut adalah gambar kegiatan pengabdian yang dilakukan di Desa Pantai Raja.



Gambar 1. Foto Kegiatan Pengabdian

### **HASIL KEGIATAN DAN PEMBELAJARAN DARI IMPLEMENTASI**

Pemilu yang dilaksanakan secara langsung berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat desa Pantai Raja mengalami beberapa persoalan sebagai berikut:

a. Politik identitas yang menguat

Pemilu yang dilaksanakan secara langsung membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pemilihan yang dilaksanakan secara langsung ini adalah menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sehingga dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung tanpa diwakilkan pada orang lain. Sementara itu, terdapat dampak negatif dilaksanakannya pemilihan secara langsung ini karena dapat menyebabkan konflik horizontal. Konflik horizontal ini disebabkan oleh menguatnya politik identitas. Politik identitas pada ranah lokal saat mengemuka dengan adanya isu “putra daerah” (Haboddin, 2012). Isu putra daerah yang berkembang dalam proses demokratisasi seperti Pilkada terus terjadi dan kondisi seperti sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan kebangsaan. Menguatnya politik identitas ini akan menyebabkan demokratisasi akan terhambat yang mana dalam demokrasi terhadap inklusifitas. Bahkan, studi yang dilakukan oleh Adiwilaga et al (2017) menjelaskan dampak politik identitas akan menyebabkan konflik di tenag masyarakat dan mengarah pada *failed state*.

Politik identitas dalam Pemilu dapat diminimalisir dengan lebih mengedepankan visi, misi, dan program

yang ditawarkan kandidat pada pemilih. Masyarakat pemilih di tingkat desa mempunyai karakteristik cenderung menerima secara bulat informasi yang ada. Oleh karena itu, penting dilakukan upaya dalam menghentikan politik identitas dengan terus melakukan sosialisasi politik mengenai Pemilu yang berintegritas dan berkualitas yang tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara Pemilu tetapi juga peserta Pemilu.

b. Politik Uang

Pemilu yang dilaksanakan secara langsung mendapatkan tantangan besar dari adanya fenomena politik uang atau *money politic* (Aspinall & Sukmajati, 2016). Politik uang ini bertujuan untuk memobilisasi massa pemilih untuk datang ke TPS untuk memilih kandidat yang bersangkutan. Praktik politik uang ini tidak hanya pemberian uang namun juga berupa barang oleh kandidat, tim sukses, maupun simpatisan pada masyarakat pemilih. Fenomena politik uang yang marak terjadi dalam Pemilu dan Pilkada disebabkan oleh faktor ekonomi dan masih lemahnya pengawasan. Politik uang yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kandidat pada masyarakat pada akhirnya menjadi tradisi yang tidak dapat dielakkan dari proses politik lima tahunan ini. Politik uang merupakan pelanggaran berat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang dapat diberikan sanksi pidana jika terbukti bersalah.

Dampak dari politik uang ini akan menjadi cikal bakal lahirnya tindakan korupsi. Selanjutnya, praktik politik uang ini akan melahirkan pejabat publik yang tidak kompeten dan mengurangi kualitas demokrasi.

Menghadapi fenomena politik uang ini, maka yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan partisipatif. Solihah et al (2018) menjelaskan pentingnya pengawasan partisipatif guna menjamin Pemilu yang demokratis. Pengawasan partisipatif ini melibatkan peran aktif masyarakat bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawal tahapan Pemilu dan ikut memantau pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang.

#### c. Data Pemilih

Persoalan data pemilih merupakan masalah krusial yang selalu dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Masalah data pemilih ini sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak politik warga negara. Elklit & Reynolds (2005) menjelaskan salah satu kriteria dalam menilai kualitas Pemilu adalah penyusunan daftar pemilih. Artinya hak memilih warga negara harus dijamin dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penyusunan daftar pemilih di daerah merupakan tanggungjawab dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). KPUD sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya melakukan registrasi pemilih,

verifikasi, dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pilkada. Persoalan yang sering muncul adalah masih terdapat masyarakat yang tidak terdata dalam DPT dan masih ditemui data pemilih ganda.

Mengatasi masalah data pemilih yang masih belum akurat dan valid ini, maka diperlukan peran aktif semua pihak (KPUD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil, dan masyarakat). *Updating* terhadap data pemilih perlu dilakukan guna memperbaiki data pemilih secara menyeluruh dan berkesinambungan. Validitas data pemilih menjadi awal dari upaya mencapai Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

#### d. Kampanye hitam

Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta Pemilu bertujuan untuk meyakinkan pemilih. Kampanye yang dilakukan baik oleh partai politik maupun kandidat menggunakan berbagai media mulai dari media cetak, baliho, spanduk, leaflet, bahkan menggunakan media sosial (medsos). Namun, yang meresahkan masyarakat desa adalah maraknya kampanye hitam atau *black campaign*. Kampanye hitam maksudnya adalah membangun persepsi buruk terhadap lawan politik yang berdampak terhadap perolehan suara dalam Pemilu (Dodu, 2015).

Sementara itu, berkenaan dengan tugas partai politik khususnya di

Kecamatan Perhentian Raja masih terdapat permasalahan krusial diperoleh hasil bahwa peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik masih minim. Partai politik sangat berperan dalam membangun demokrasi (Diamond & Gunther, 2001). Peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat akan tetapi juga berguna bagi partai politik. Partai politik akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat bahkan dukungan yang diperlukan dalam Pemilu. Namun, faktanya di Desa Pantai Raja kegiatan pendidikan politik dan menghimpun aspirasi masyarakat masih belum optimal dilakukan oleh partai politik.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam kegiatan pendidikan kewarganegaraan dengan tema Pemilu dan partai politik dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa telah mampu memahami mengenai proses Pemilu dan peran dari partai politik. Masalah-masalah yang acap kali terjadi pada masa Pemilu juga telah berhasil diidentifikasi dan solusi terhadap masalah tersebut juga telah diperoleh melalui kegiatan ini. Rekomendasi yang dapat diberikan melalui kegiatan pengabdian ini adalah pendidikan kewarganegaraan merupakan tanggungjawab bersama dari pemerintah, partai politik dan perguruan tinggi. Oleh

karena itu, dibutuhkan sinergitas dan kerjasama yang baik dari pemerintah, partai politik, dan akademisi guna mencerdaskan kehidupan bangsa yang dimulai dari desa.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Adiwilaga, R., Ridha, & Mustofa, M. U. (2017). Pemilu dan Keniscayaan Politik Identitas Etnis di Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jurnal Bawaslu*, 3(2), 269-284.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Bishop, S., & Hoeffler, A. (2016). Free and fair elections: A new database. *Journal of Peace Research*, 53(4), 608-616.
- Diamond, L., & Gunther, R. (Eds.). (2001). *Political parties and democracy*. JHU Press.
- Dodu, A. B. D. (2017). Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 52-60.
- Elklit, J., & Reynolds, A. (2005). A framework for the systematic study of election quality. *Democratization*, 12(2), 147-162.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya politik identitas di ranah lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1), 116-134

- Nabatchi, T., & Amsler, L. B. (2014). Direct public engagement in local government. *The American Review of Public Administration*, 44(4\_suppl), 63S-88S.
- Oesterreich, D. (2003). The impact of political knowledge and democratic competencies on desirable aims of civic education. *Journal of Social Science Education Online*, 1, 2003-1.
- Rahayu, M. (2007). *Pendidikan kewarganegaraan*. Grasindo.
- Yoldaş, Ö. B. (2015). Civic education and learning democracy: their importance for political participation of young people. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 174, 544-549.